

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, Santoso. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Cetakan ke X, PT. Eresco, Jakarta-Bandung.
- _____. 1995. *Psikologi Kerja. Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco, Bandung.
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum* (alih bahasa Arief Sidharta), PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Fauzi. Achmad dan Iskandar, 1982. *Cara Membaca APBD*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang.
- Halim. Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Haryono, S., 1999. *Pengantar Hukum Pajak*. Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Mardiasmo. 2001. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andy, Yogyakarta.
- Memesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soemitro Rochmat, 1988. *Pajak dan Pembangunan*. PT. Eresco, Bandung.

_____, 1989. *Pajak dan Pembangunan*. PT. Eresco, Bandung.

_____. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT. Eresco, Bandung.

Soemitro Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan I, II, & III*, PT. Eresco, Bandung.

Soekismo, B. 2002, *Ilustrasi Model Penelitian Hukum Normatif*. Seminar yang diselenggarakan Forum Peduli masyarakat Banyumas..

_____. 2003. *Pengantar Perpajakan*. FH UGM, Yogyakarta.

Wiwoho, Jamal, 2004 dan Lulik, 2004, *Dasar-dasar Penyelesaian Pajak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BPSP.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

PP RI No.16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

